PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Sulbadana*

Abstract

International law insists that the sovereignty of indigenous peoples in natural resources management is a right that must be protected where the state or the government is obliged to make it happen. The consideration of law and philosophy in giving the indigenous peoples

protection in exploiting the natural resources because the indigenous peoples have cultural values and local wisdom based on Sustainable Development Principle. It means that the establishment of a certain forest as a conservation area like the Lore Lindu National Park should not be contrary and detrimental to the welfare of the people around that area as the indigenous peoples were still exist from generation to generation and have a close relationship in emotion with the forest. Keywords: Sustainable Development Principle, Indigenous Peoples, international environment law.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia (terutama penduduk asli atau masyarakat adat yang berada di sekitar hutan), termasuk makhluk hidup lainnya. Keterkaitan yang erat antara manusia dengan lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya hutan, dikarenakan manusia bukanlah satu-satunya unsur dalam sistem kehidupan (*antroposentris*). Sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi, disamping manusia unsur lain (*ekosentris*), yakni lingkungan termasuk di dalamnya hutan, yang merupakan salah satu unsur kesatuan sistem kehidupan yang membentuk ekosistem besar (planet bumi)

sebagai sistem pendukung kehidupan (*life supporting system*).¹ Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan manusia terutama masyarakat adat (penduduk asli) yang berada di sekitar hutan yang seringkali termarginalkan dalam kegiatan pembangunan.

Pada dasarnya hutan sebagai salah satu sumber daya alam mempunyai dua fungsi, yakni fungsi ekonomi dan fungsi ekologi.² Fungsi ekonomi suatu hutan terletak pada nilai kayu dan nir-kayu serta rotan yang dikandungnya. Sementara fungsi ekologinya yang sangat penting antara lain, Hidro-orologi, penyimpanan sumber daya genetik, pengaturan kesuburan tanah hutan dan iklim, penyimpanan sink atau sebagai resor karbon.³ Terkait dengan fungsi hutan yang terakhir sebagai resor karbon, maka dalam fungsi ekologis hutan (pelestarian) sekaligus mengandung nilai ekonomi yang tinggi sesuai dengan ketentuan Konvensi Perubahan Iklim 1992 dan Protokol Kyoto 1997 melalui skema *Clean Development Mechanism* (Mekanisme Pembangunan Bersih)⁴

Meskipun pengetahuan mengenai pengaturan ekologi hutan sudah cukup luas dikalangan masyarakat terutama pemerintah, sehingga seharusnya

---

* Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Makalah pada seminar “Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Sigi Terhadap Perlindungan Atas hak-hak Adat Masyarakat Sigi”, di Palu, 27 Desember 2010

¹ Daud Silalahi, Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan, Hukum dan Pembangunan, No.4, Agustus 1989, hlm. 451

² Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm.27

³ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴ Lihat lebih lanjut Sulbadana, Strategi Pelestarian Hutan Berdasarkan Konsep Mekanisme Pembangunan Bersih Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional, Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran 2010.

menimbulkan kesadaran hukum untuk melestarikannya, namun kenyataannya tidak demikian. Justru yang menonjol adalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi ekonominya, sebagaimana terlihat dari gencarnya pembangunan industri kehutanan dan berdampak pada maraknya kegiatan *illegal logging*, sehingga kemudian menimbulkan kerusakan sumber daya hutan di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Sulawesi tengah.⁵ Seperti halnya penduduk asli (masyarakat adat) umumnya di Indonesia yang berada di sekitar hutan, penduduk asli Sulawesi Tengah khususnya masyarakat Toro, juga kurang mendapat keuntungan jika tidak hendak dikatakan sama sekali tidak, dalam setiap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka, baik dalam kebijakan konservasi hutan terlebih lagi dalam pemanfaatan hutan untuk produksi, padahal legalitas formal telah menjamin dan melindungi eksistensi mereka untuk mendapatkan manfaat dan kesejahteraan secara berkelanjutan dari setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan.

Sedemikian pentingnya eksistensi masyarakat adat (penduduk asli) atau yang dikenal dengan penamaan *Indigenous Peoples* dalam hubungannya dengan alam sekitarnya (sumber daya hutannya), hukum internasional kemudian menegaskan bahwa pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh

---

⁵ Sejak lahirnya Undang-Undang kehutanan yang pertama (UU No. 5 tahun 1967) dan kebijakan pemerintah orde baru dalam pemanfaatan hutan untuk kepentingan pembangunan nasional, hingga saat ini perkiraan terhadap kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 56,98 juta Ha dari 120,35 juta Ha luas hutan yang ada, Harian Kompas, 19 januari 2002 dan 20 september 2003. Di Sulawesi Tengah kerusakan hutan bukan saja terjadi pada kawasan hutan produksi, tidak terkecuali kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) juga mengalami nasib yang sama dengan luas kerusakan sekitar 5000 Ha, lihat lebih lanjut Sulbadana, Implementasi Hukum Internasional Mengenai Perubahan Iklim Pada Upaya Pelestarian Hutan TNLL Sulawesi Tengah, Tesis Program S2 Unpad 2005.

negara harus diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya.⁶ Bahkan ketentuan Pasal 22 Deklarasi Rio 1992 menegaskan bahwa setiap negara atau pemerintah berkewajiban untuk menghormati tradisi, pengetahuan dan peran penduduk asli dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan, serta memelihara jati diri, kebudayaan dan kepentingan mereka. Demikian juga Konvensi ILO 1989 dalam Pasal 15 menegaskan bahwa penduduk asli (*Indigenous Peoples*) berhak atas terpeliharanya sumber daya alam, termasuk di dalamnya hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, pemanfaatan serta konservasi sumber daya tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya hukum internasional telah menegaskan bahwa kedaulatan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya merupakan hak asasi yang harus dilindungi dimana negara atau pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya

Pengakuan dan jaminan yang sama pada tingkat nasional, telah tertuang dalam sistem hukum nasional melalui penegasan konstitusional sebagaimana tersebut dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Demikian juga dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Selanjutnya Pasal 33 (3) UUD 1945 dengan gamblang menyatakan bahwa bumi

---

⁶ Resolusi MU PBB No.41/128 tentang: *Declaration On The Right to Development*.

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila dikaji secara mendalam berdasarkan dalil-dalil dan konstruksi hukum, maka pada ketentuan pasal tersebut akan ditemukan makna yang komprehensif, sebab pada dasarnya mencakup pengertian prinsip utama pengelolaan lingkungan hidup (*sustainable Development*) yang dari segi peristilahan, baru dikenal kemudian. Namun secara substansial para pendiri negara di masa yang lalu sesungguhnya telah mempunyai loncatan berfikir jauh ke depan (*futuristik*) dalam menetapkan ketentuan pasal tersebut sebagai ketentuan yang mengatur eksistensi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat hukum adat, yang bermukim di sekitar perkawasan hutan sebagai bagian esensial dari rakyat Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 UUD 1945 tentang negara hukum adalah penegasan konstitusional negara terhadap eksistensi dan perlindungan kepada kepentingan masyarakat hukum adat, sebab hukum sebagai landasan bernegara adalah terdiri atas hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adat Indonesia, sehingga dualisme hukum tentang pertanahan sebelumnya dapat diakhiri yang didalamnya sebagian mengandung ketentuan-ketentuan hukum kolonial barat yang diskriminatif dan bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Di samping itu, dilandaskannya pengaturan hukum pertanahan dalam UU No.5 tahun 1960⁷ pada hukum adat, adalah untuk

---

⁷ UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

menjamin adanya kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁸

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, penguasaan pada level tertinggi terhadap bumi (tanah), air dan ruang angkasa berada pada negara, namun penguasaan tersebut tidak diartikan sebagai hak memiliki dari negara, melainkan penguasaan dalam arti kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatannya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 14 ayat 2), dan bahkan hak menguasai dari negara tersebut dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat sepanjang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 2 ayat 4). Demi kepastian hukum dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah, undang-undang menyediakan beberapa jenis hak antara lain hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak ulayat masyarakat adat.

Selain undang-undang pertanahan, pengakuan akan eksistensi dan kepentingan masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan, juga diatur dalam undang-undang kehutanan No. 41 tahun 1999. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataannya ada dan diakui keberadaannya maka berhak memungut hasil hutan, melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Untuk

---

⁸ Lihat Penjelasan Umum dan ketentuan Pasal 2 (3) dan Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960.

itu pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat di tetapkan dengan peraturan daerah, (Pasal 67).

Mencermati ketentuan tersebut di atas, maka seperti halnya undang-undang lain pada umumnya, undang-undang kehutanan ini pun mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan mendasar sehingga berdampak pada lemahnya implementasi perlindungan hak masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan sebagaimana dirasakan oleh masyarakat hukum adat umumnya di Indonesia. Kelemahan dimaksud antara lain pengaturan mengenai hutan adat dan masyarakat hukum adat dalam UU No. 41 tahun 1999 sangat sedikit (hanya di atur dalam 2 pasal) dibanding pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan produksi (ekonomi). Selain itu tidak ada kejelasan mengenai hubungan hukum yang tegas antara hutan adat sebagai objek disatu pihak dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek dilain pihak, sehingga masyarakat hukum adat umumnya, dan masyarakat Toro khususnya mengalami kesulitan dalam mengaktualisasikan hak-haknya terhadap pemanfaatan sumber daya hutan yang ada disekitarnya sebagai hutan adat, terlebih lagi jika hal itu berbenturan dengan kawasan sumber daya hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahan utamanya antara lain:

1. Apakah masyarakat Sigi yang tergolong sebagai komunitas masyarakat adat mempunyai kewenangan sesuai dengan hak-hak adat mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan disekitarnya sebagai hutan adat, sementara

sumber daya hutan tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan sebagai TNLL?

2. Sebagai masyarakat hukum adat yang dijamin kedudukannya oleh konstitusi dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan, bagaimanakah hal tersebut dapat diwujudkan dan apa implikasi hukumnya?

II. PEMBAHASAN

Munculnya perhatian terhadap pentingnya perlindungan bagi kepentingan penduduk asli (masyarakat adat) dalam pemanfaatan sumber daya alam, disebabkan oleh adanya kecenderungan ketimpangan keadilan dari setiap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah dengan dalih untuk kepentingan pembangunan nasional.⁹ Jadi persoalannya adalah menyangkut ketidakadilan ekonomi yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat hukum adat dari setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka. Fenomena tersebut tidak saja terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga berlangsung pada tingkat global yang tercermin dalam situasi dan kondisi kehidupan umat manusia dewasa ini, dimana 70% penduduk dunia yang umumnya berasal dari negara-negara berkembang berada dalam keterbelakangan disebabkan karena mereka hanya memperoleh 30%

---

⁹ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 4.

pendapatan dunia,¹⁰ yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam termasuk kerusakan hutan tropis yang terjadi di mana-mana, sehingga memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia di masa mendatang. Ironisnya masyarakat atau negara yang menjadi *potential victim* dari keadaan tersebut adalah negara atau masyarakat keterbelakang.

Kondisi yang sama di tingkat nasional dialami oleh masyarakat Sigi khususnya komunitas masyarakat hukum adat Toro yang tidak memperoleh keadilan dan keuntungan ekonomi dari kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang ada dilingkungan mereka dengan penetapan kawasan hutan Lore Lindu sebagai kawasan konservasi Taman Nasional. Padahal konstitusi telah menjamin bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus diperuntukkan bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat (tidak terkecuali masyarakat hukum adat Sigi) secara berkelanjutan.

Sesuai dengan asas hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 dan UU No. 5 tahun 1990, penetapan kawasan hutan tertentu sebagai suatu kawasan konservasi seperti TNLL adalah sangat diperlukan dalam rangka memelihara keseimbangan ekologi sebagai daya dukung kehidupan tidak saja pada tingkat nasional tetapi juga dunia secara keseluruhan dan bahkan lintas generasi bagi kepentingan anak cucu di masa mendatang. Namun demikian penetapan suatu kawasan konservasi tidak boleh bertentangan dan merugikan kepentingan kesejahteraan masyarakat yang

---

¹⁰ Daud Silalahi, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Makalah pada seminar Pembangunan Hukum Nasional di Bali, Juli 2003.

ada di sekitarnya sebagai masyarakat adat yang dalam kenyataannya tetap eksis, dan telah lama secara turun temurun mempunyai hubungan dan ikatan batin (emosional) dengan hutan tersebut. Pertimbangan hukum dan filosofi diberikannya pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, adalah karena masyarakat adat memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang pada dasarnya berintikan prinsip *Sustainable Development* dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Oleh karena itu fakta menunjukkan bahwa degradasi dan deforestasi hutan yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian konsesi HPH dan sektor perkebunan kepada pengusaha misalnya.

Bila dicermati ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya yang berada dibawahnya, maka tidak terdapat 1 ketentuan pun yang membatasi kewenangan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya (sumber daya hutan) sepanjang hak dimaksud dapat dibuktikan keberadaannya dalam kenyataan, termasuk ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (penetapan TNLL) sehingga penetapan suatu hutan sebagai kawasan konservasi harus bersinergi dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat adat setempat yang memiliki nilai-nilai kearifan lingkungan yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu penetapan suatu kawasan konservasi tidak seharusnya dibenturkan dengan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, sebab penafsiran terhadap ketentuan mengenai

konservasi sumber daya alam yang diatur baik dalam UU No. 5 tahun 1990 maupun UU No. 41 tahun 1999 tidak bersifat absolut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya SKB Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969 K/050/M.PE/1999 dan 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam kawasan hutan,¹¹ yang pada intinya memberi kemungkinan dilakukannya kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung, cagar alam dan suaka marga satwa sepanjang mendapat izin dari Menteri Kehutanan, (Pasal 2 ayat 1). Selanjutnya dalam Pasal 13 dari SKB tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penetapan atau perluasan taman nasional, taman wisata, dan hutan dengan fungsi khusus, telah terdapat kegiatan – kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, maka lokasi dimana terdapat kegiatan tersebut dikeluarkan dari penetapan atau perluasan taman nasional, taman wisata dan hutan dengan fungsi khusus.

Mengacu pada ketentuan tersebut, jelas kiranya bahwa penetapan kawasan TNLL tidak seharusnya tumpang tindih dengan bagian kawasan hutan yang mempunyai hubungan erat dengan masyarakat adat setempat. Jangankan bagi kepentingan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat adat yang memiliki kearifan lingkungan dalam rangka pelestarian hutan, untuk kepentingan kegiatan pertambangan saja dimungkinkan padahal kegiatan tersebut tidak menjamin terpeliharanya kelestarian hutan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa masyarakat adat Sigi yang berada disekitar kawasan TNLL sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempunyai hak untuk mengelola dan

---

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 169.

memanfaatkan sumber daya hutan disekitarnya yang berada pada kawasan TNLL, sebab kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya dan adat yang mengandung kearifan lingkungan yang pada dasarnya sejalan dengan kebijakan konservasi hutan TNLL.

Meskipun kawasan hutan dimaksud statusnya telah menjadi bagian dari hutan konservasi TNLL, namun tidak berarti bahwa status hukum dari hutan dimaksud tidak dapat diubah lagi apabila masyarakat adat mengajukan permohonan untuk itu. Persoalannya adalah jenis hak bagaimanakah yang dapat diajukan sehingga implikasinya bermuara pada adanya kepastian hukum hak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap hutan tersebut.

Pada dasarnya terdapat 2 pilihan jenis hak yang dapat di ajukan dan masing-masing mempunyai konsekuensi dan implikasi hukum yang berbeda, yakni:

1. Hak penguasaan hutan dengan status hutan adat
2. Hak penguasaan hutan dengan hak ulayat.

Hak penguasaan terhadap hutan tidak saja terkait dengan undang-undang kehutanan melainkan juga berhubungan erat dengan ketentuan hukum pertanahan. Hak penguasaan terhadap hutan adat disamping tidak dikenal dalam undang – undang pertanahan, undang-undang kehutanan tidak mengatur secara rinci dan tegas, sehingga pada dasarnya hutan adat yang dimaksud dalam undang – undang kehutanan adalah sesuatu yang bersifat semu. Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 dan 6, hutan adat adalah hutan yang tidak dapat dilekatkan hak padanya, sebab hutan adat adalah hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah. Oleh karena itu hak penguasaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat adalah bersifat tidak kuat dan tidak penuh sebagaimana halnya hak milik dan hak-hak lainnya yang dikenal dalam undang-undang pertanahan.

Selain itu implikasi hukum yang paling mendasar yang dapat timbul dari pilihan hutan adat adalah kemungkinan munculnya tuntutan hak atas tanah adat dimasa yang akan datang pada kawasan hutan adat tersebut. Jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat tersebut di masa yang akan datang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip konservasi pelestarian lingkungan, sebab status hukum atas tanah adat harus dikonversi kedalam hak milik perorangan sesuai dengan ketentuan undang-undang pertanahan, hal mana tidak sesuai dengan semangat dan jiwa hak kepemilikan bersama dari masyarakat adat terhadap sumber daya hutan yang sedang diperjuangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah melalui undang-undang kehutanan, tidak ikhlas sepenuhnya memberi kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola kawasan hutan di sekitarnya dengan status hutan adat.

Berbeda dengan hak penguasaan terhadap sumber daya hutan dengan status hutan adat, penguasaan terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat adat dengan status hak ulayat adalah lebih menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari, sebab hak ulayat terhadap sumber daya hutan adalah hak kommunal (bersama) masyarakat hukum adat yang tidak dapat diberikan atau dimiliki secara perorangan. Persoalannya kemudian adalah

terminologi hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam undang-undang kehutanan. Meskipun demikian apabila dikehendaki,¹² pilihan hak ulayat sebagai landasan penguasaan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutannya dapat diajukan demi kepentingan dan tujuan kemaslahatan masyarakat adat.

Setelah pilihan hak atas penguasaan terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat adat diketahui, maka selanjutnya tinggal bagaimana hak tersebut dapat diperoleh masyarakat adat sehingga amanat konstitusional UUD 1945 dapat terwujud. Untuk maksud tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Upaya pembuktian tentang adanya komunitas masyarakat Sigi dengan jati diri sebagai masyarakat hukum adat.
2. Pembuktian tentang eksistensi masyarakat Sigi sebagai suatu komunitas adat yang telah lama mendiami daerah di sekitar kawasan konservasi TNLL.
3. Pemetaan batas-batas wilayah berlakunya hukum adat masyarakat termasuk batas wilayah hutan yang mempunyai hubungan dan ikatan yang erat sejak lama dengan masyarakat adat setempat.
4. Dukungan dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi .

---

¹² Walaupun hak ulayat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan, namun berdasarkan teori hukum progresive yang mendasarkan tujuan hukum terutama pada pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, maka hak ulayat dimaksud dapat diajukan dan diwujudkan.

5. Pembuatan Perda tentang eksistensi keberadaan masyarakat adat dan pengaturan hak penguasaan pengelolaan terhadap sumber daya hutan yang ada disekitarnya.

Kelima unsur di atas yang perlu mendapatkan tambahan penjelasan adalah perlunya dukungan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi dalam rangka perwujudan hak-hak hukum dimaksud. Kebijakan politik pemerintah provinsi dalam rangka eksistensi tanah-tanah adat Sulawesi Tengah adalah didasarkan pada keputusan penguasa perang tahun 50-an yang pada intinya menegaskan bahwa semua tanah di Sulawesi Tengah adalah tanah bekas swapraja,¹³ dan atas dasar itu pada tahun 1992 Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan surat yang berintikan bahwa semua tanah-tanah di Sulawesi Tengah yang belum terdaftar adalah tanah negara. Karena itu perolehan hak atas kepemilikan tanah yang belum terdaftar harus dilakukan dengan akte penyerahan hak dari pemerintah.

Terhadap kepastian hukum akan hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat Sulawesi Tengah, surat Gubernur tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan masalah. Namun kebijakan tersebut dapat berimplikasi terhadap status kepemilikan komunal atas tanah oleh masyarakat adat serta eksistensi masyarakat itu sendiri. Mendasarkan pada suatu anggapan bahwa semua tanah-tanah dimaksud adalah tanah bekas swapraja (tanah negara), dimana kepemilikan hak-hak adat atas tanah pada umumnya belum atau tidak terdaftar pada saat itu, maka dapat diartikan sebagai penyangkalan terhadap adanya masyarakat adat di

---

¹³ Mohon diteliti kembali surat Gubernur tersebut.

Sulawesi Tengah. Namun demikian pada tahun 2000, kebijakan Gubernur tersebut telah direvisi melalui surat yang berintikan bahwa tanah-tanah yang belum terdaftar yang hendak dimohonkan kepemilikannya sebagai tanah-tanah adat, sepanjang dalam kenyataannya ada dan dapat dibuktikan, maka permohonan tersebut dapat diproses. Meskipun kebijakan pemerintah Provinsi dibidang pertanahan tidak lagi menutup peluang adanya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah, namun upaya mewujudkan hak pengelolaan masyarakat adat terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, sebagai penutup berikut ini dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Hak penguasaan masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya termasuk di dalamnya sumber daya hutan, adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.
2. Meskipun sumber daya hutan yang berada di sekitar wilayah hukum masyarakat adat Sigi telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu yang harus dilindungi, namun status pengelolaan dari sumber daya hutan dimaksud, disatu pihak tetap terbuka untuk diubah dan masyarakat hukum adat dilain pihak

tetap mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hak penguasaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan budaya dan adat istiadat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan kearifan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam.

3. Terdapat 2 pilihan hak penguasaan masyarakat adat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di sekitarnya, yaitu hak penguasaan dengan status hutan adat dan hak penguasaan dengan status hak ulayat.
4. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adat, maka perlu di buat Peraturan Daerah tentang eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat dan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Karya Tulis Ilmiah

Daud Silalahi, Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan, Hukum dan Pembangunan, No.4, Agustus 1989.

Daud Silalahi, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Makalah pada seminar Pembangunan Hukum Nasional di Bali, Juli 2003.

- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Resolusi MU PBB No.41/128 tentang *Declaration On The Right to Development*.
- Sulbadana, *Strategi Pelestarian Hutan Berdasarkan Konsep Mekanisme Pembangunan Bersih Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran 2010.
- Sulbadana, *Implementasi Hukum Internasional Mengenai Perubahan Iklim Pada Upaya Pelestarian Hutan TNLL Sulawesi Tengah*, Tesis Program S2 Unpad 2005.

B. Dokumen

UUD Tahun 1945

UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Konvensi Perubahan Iklim Tahun 1992.

Protokol Kyoto Tahun 1997.

Deklarasi Rio Tahun 1992.